

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi dalam kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Tolak ukur kemajuan suatu bangsa tidak semata bertumpu pada angka pendapatan nasional, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti capaian di bidang pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta sejauh mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ekonomi, keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja dapat diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita.

Keterlibatan perempuan di sektor ekonomi memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian pada level mikro, terutama melalui peningkatan pendapatan rumah tangga yang berperan dalam memperkuat kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, bertambahnya perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga isu partisipasi tenaga kerja perempuan sudah seharusnya mendapat perhatian yang setara dengan perhatian yang diberikan kepada tenaga kerja laki-laki (Hasian & Harmadi, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan juga bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

TPAK wanita merupakan ukuran yang menggambarkan proporsi perempuan pada usia produktif yang secara aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dalam

statusnya sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Nilai TPAK wanita yang semakin meningkat menjadi cerminan bahwa perempuan memiliki peran yang kian signifikan dalam perekonomian, sekaligus mengindikasikan tumbuhnya kemandirian finansial di kalangan perempuan (Septiawan & Wijaya, 2021).

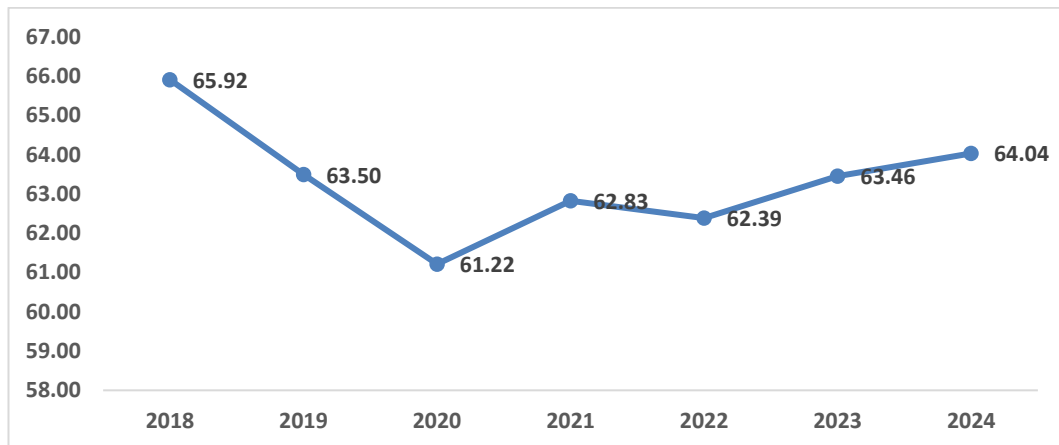
Keragaman kondisi sosial dan ekonomi di antara kabupaten/kota menjadi salah satu faktor yang turut membentuk pola keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi. Sejumlah kajian mengungkapkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja membawa dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang di antaranya tercermin dari naiknya output per kapita seiring dengan meningkatnya proporsi perempuan yang aktif bekerja (Appiah, 2018).

TPAK wanita merupakan indikator yang mencerminkan seberapa besar proporsi wanita usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana potensi tenaga kerja wanita telah terserap dan berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian. Nilai TPAK wanita yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besarnya kontribusi wanita dalam aktivitas produktif, yang pada gilirannya turut menggerakkan pembangunan ekonomi. Meningkatnya keterlibatan wanita dalam angkatan kerja juga mencerminkan pemanfaatan sumber daya manusia yang semakin optimal, sehingga berimplikasi pada perluasan kapasitas produksi, peningkatan output ekonomi daerah, serta penguatan daya saing wilayah. Lebih dari itu, meningkatnya jumlah wanita yang berpartisipasi dalam angkatan kerja juga berpotensi meningkatkan

pendapatan rumah tangga. Kondisi ini berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menurunkan risiko ketergantungan pada satu sumber penghasilan tunggal.

Secara teoritis, tingginya tingkat partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efisien. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, maka perekonomian mampu memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja yang tersedia secara lebih maksimal. Selain memberikan dampak ekonomi, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga memiliki manfaat sosial, seperti meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, memperluas akses pendidikan dan kesehatan keluarga, serta mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Kurniasari *et al.* (2025) menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan perlu diintegrasikan dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga dikaji oleh Safrina & Ratna (2023) yang meneliti keterkaitan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, yang menegaskan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan menjadi hal yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Berikut merupakan perkembangan TPAK Wanita rata-rata dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:



Gambar 1.1 Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Sumatera Utara Tahun 2018-2024 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan TPAK perempuan rata-rata di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2018–2024. Pada tahun 2018, TPAK perempuan tercatat sebesar 65,92%, namun mengalami penurunan menjadi 63,50% pada tahun 2019, atau turun sebesar 2,42 poin persentase. Penurunan ini berlanjut lebih dalam pada tahun 2020, di mana TPAK perempuan kembali menurun menjadi 61,22%, atau turun sebesar 2,28 poin persentase. Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 ini dipicu oleh melemahnya penyerapan tenaga kerja wanita, yang semakin diperparah oleh tekanan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menekan aktivitas ekonomi secara luas, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan UMKM yang selama ini menjadi penyerap utama tenaga kerja wanita, sehingga mendorong sebagian wanita keluar dari pasar kerja atau berhenti aktif untuk sementara waktu.

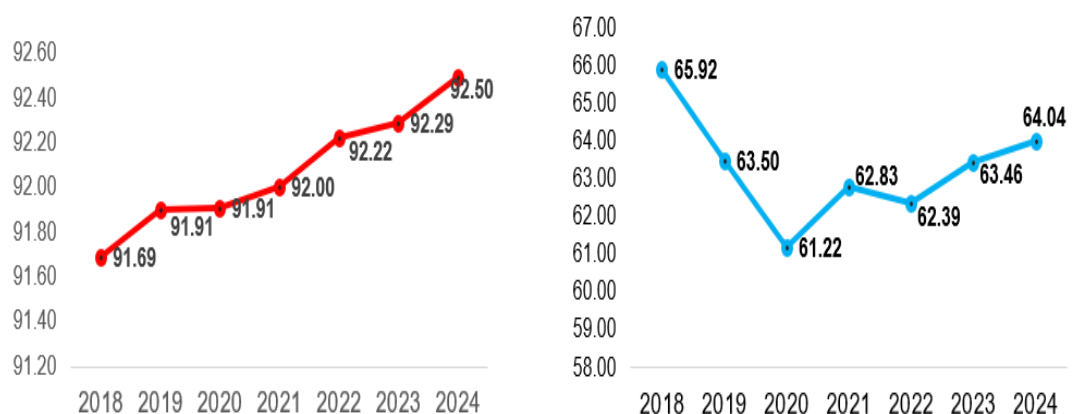
Pada tahun 2021, TPAK wanita mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan meningkat dari 61,22% menjadi 62,83%, atau naik sebesar 1,61 poin persentase. Meski demikian, angka tersebut masih jauh di bawah capaian tahun 2018, sehingga belum dapat dikatakan sebagai pemulihan yang optimal. Pada tahun 2022, TPAK wanita kembali terkoreksi menjadi 62,39%, atau turun 0,44 poin persentase dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perekonomian mulai pulih, keterlibatan wanita dalam angkatan kerja masih terhambat oleh terbatasnya lapangan kerja formal serta faktor sosial dan domestik yang belum sepenuhnya kondusif. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2023 dan 2024, di mana TPAK wanita meningkat masing-masing menjadi 63,46% dan 64,04%, mencerminkan membaiknya keterlibatan wanita di pasar tenaga kerja seiring pemulihan ekonomi daerah pascapandemi, meskipun belum kembali ke level sebelum tahun 2019.

Keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), rata-rata lama sekolah, serta tingkat upah minimum. Sebagai indikator pembangunan yang memperhatikan aspek gender, IPG digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan akses antara wanita dan laki-laki pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Nilai IPG yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perbedaan capaian pembangunan antara kedua gender semakin berkurang, sehingga mencerminkan kondisi yang lebih setara (Sari *et al.*, 2024). Nilai IPG yang tinggi menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan gender dalam pembangunan. Meningkatnya nilai IPG diharapkan mendorong wanita untuk semakin aktif di pasar tenaga kerja seiring

terbukanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Adolph, 2024). Namun, peningkatan IPG belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan TPAK wanita secara merata di seluruh wilayah.

IPG mencerminkan kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan wanita dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Nilai IPG yang semakin tinggi mengindikasikan semakin meratanya akses wanita terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia wanita sekaligus memperluas peluang mereka di pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (2023) menegaskan bahwa peningkatan IPG berkaitan erat dengan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, peningkatan tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang mendorong produktivitas tenaga kerja perempuan.

Perkembangan IPG dan TPAKW rata-rata dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Rata-rata Indeks Pembangunan Gender (Poin Indeks) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Sumatera Utara Tahun 2018-2024

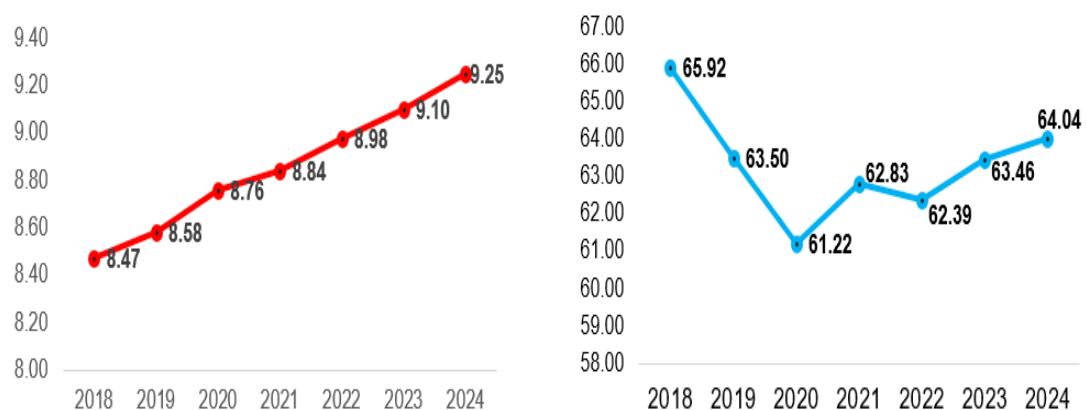
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selama periode 2018–2024. Secara umum, IPG mengalami peningkatan sepanjang periode 2018–2024, yang menandakan semakin kecilnya kesenjangan gender dalam pembangunan. Namun, pada tahun 2021, IPG tercatat meningkat dari 91,91 pada tahun 2020 menjadi 92,00 pada tahun 2021, atau naik sebesar 0,10%, sementara pada saat yang sama TPAK perempuan justru menurun dari 65,92% pada tahun 2019 menjadi 63,50% pada tahun 2020, atau turun sebesar 2,42 %. Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan pasar tenaga kerja, terutama sektor informal dan jasa yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, serta meningkatnya beban kerja domestik yang mendorong perempuan keluar dari pasar kerja meskipun capaian pembangunan gender secara agregat tetap meningkat (BPS, 2021).

Fenomena serupa kembali ditemukan pada tahun 2022, di mana IPG meningkat dari 93,41 menjadi 93,92 atau naik sebesar 0,51%, sementara di saat yang sama TPAK wanita justru terkoreksi dari 62,83% menjadi 62,39%, atau turun sebesar 0,44%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan gender belum serta-merta dapat diterjemahkan menjadi peningkatan partisipasi ekonomi wanita secara langsung, mengingat masih adanya hambatan berupa keterbatasan lapangan kerja formal, kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan industri, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang beragam di tingkat wilayah (Sari & Putri, 2022).

Di samping kesetaraan gender, capaian pendidikan wanita turut memegang peranan penting dalam mendorong TPAK wanita. RLS perempuan mencerminkan sejauh mana wanita dewasa di suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. Semakin tinggi RLS perempuan, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dari sisi keterampilan, pengetahuan, maupun kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja, sehingga mendorong wanita untuk lebih aktif masuk dan bertahan dalam pasar tenaga kerja. Wanita berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai. Oleh karena itu, peningkatan RLS perempuan menjadi salah satu faktor pendorong utama partisipasi kerja wanita (Saputri, 2024).

Perkembangan rata-rata RLSP dan TPAKW rata-rata dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Sumatera Utara Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita selama periode 2018–2024 juga menunjukkan pola yang tidak selalu searah. RLS perempuan mengalami

peningkatan sepanjang periode pengamatan, yang mencerminkan adanya perbaikan capaian pendidikan perempuan.

Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 8,47 tahun pada 2018 menjadi 8,58 tahun pada 2019, atau bertambah sebesar 0,11 tahun, sementara pada saat yang sama TPAK perempuan justru menurun dari 65,92% pada tahun 2018 menjadi 63,50% pada tahun 2019, atau turun sebesar 2,42 poin persentase. Penurunan berlanjut pada tahun 2020, di mana RLS kembali meningkat menjadi 8,76 tahun namun TPAK perempuan turun lebih dalam menjadi 61,22%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja. Akibatnya, meskipun tingkat pendidikan perempuan mengalami peningkatan, banyak perempuan untuk sementara waktu meninggalkan pasar kerja karena menyusutnya lapangan pekerjaan serta bertambahnya tanggung jawab dalam rumah tangga (BPS, 2021).

Fenomena serupa terjadi pada tahun 2022, di mana RLSP terus menunjukkan kenaikan dari 8,84 tahun menjadi 8,98 tahun atau bertambah 0,14 tahun, namun TPAK wanita justru terkoreksi dari 62,83% menjadi 62,39%, atau turun sebesar 0,44 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan wanita yang terus meningkat belum secara otomatis mendorong peningkatan partisipasi kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kecenderungan wanita untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sehingga menunda keputusan memasuki pasar kerja, belum tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, serta masih kuatnya pengaruh faktor sosial

dan budaya yang membatasi keterlibatan wanita dalam aktivitas ekonomi di sebagian wilayah (BPS, 2023).

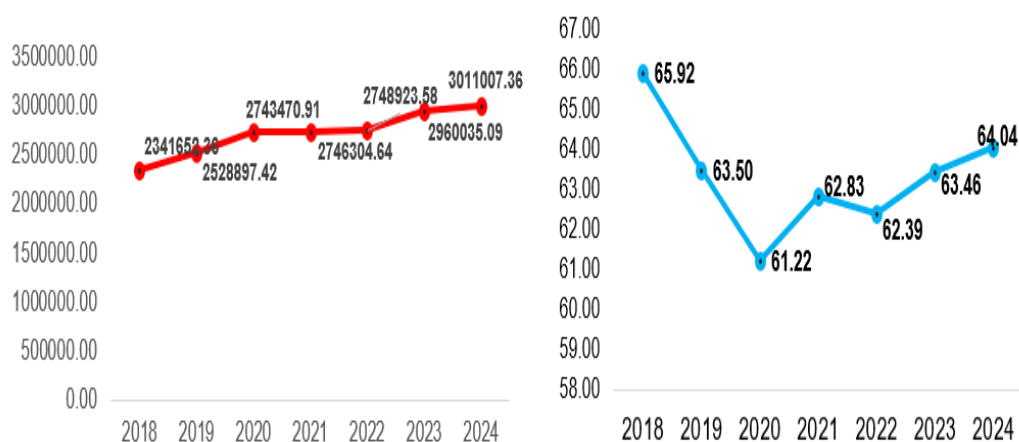
Faktor lain yang memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja adalah upah. Menurut Sukirno (2021), upah didefinisikan sebagai imbalan yang diterima tenaga kerja atas kontribusinya dalam proses produksi, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat upah memegang peranan krusial dalam membentuk penawaran tenaga kerja, karena semakin tinggi upah yang diterima, semakin besar insentif bagi individu untuk memasuki pasar kerja. Upah tidak hanya mencerminkan nilai produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk bekerja atau tidak bekerja.

Mengingat cakupan penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka indikator upah yang digunakan sebagai acuan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK merupakan batas bawah upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi setiap pelaku usaha dalam memberi kompensasi kepada tenaga kerjanya, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kondisi perekonomian daerah setempat. Perbedaan besaran UMK antar kabupaten/kota di Sumatera Utara mencerminkan variasi dalam tingkat kemajuan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta karakteristik struktur usaha yang berkembang di masing-masing wilayah.

Dalam kaitannya dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, UMK memiliki hubungan yang erat karena tingkat upah yang lebih tinggi dapat

meningkatkan manfaat ekonomi dari bekerja, sehingga mendorong perempuan untuk masuk atau bertahan dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan UMK berpotensi meningkatkan TPAK perempuan, karena upah yang layak dapat mengimbangi biaya peluang yang dihadapi perempuan, seperti tanggung jawab domestik dan pengasuhan. Namun demikian, pengaruh UMK terhadap TPAK perempuan juga dapat bersifat tidak seragam antarwilayah, karena dipengaruhi oleh struktur pasar kerja, ketersediaan lapangan kerja formal, serta karakteristik sosial ekonomi perempuan di masing-masing kabupaten/kota.

Perkembangan rata-rata UMK dan TPAK rata-rata dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Sumatera Utara Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) rata-rata di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sepanjang periode 2018–2024, yang mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pengupahan guna menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja. Namun, pada tahun 2019, UMK meningkat dari Rp2.341.652 pada

tahun 2018 menjadi Rp2.528.897 pada tahun 2019, atau naik sebesar Rp187.245, sementara pada saat yang sama TPAK perempuan justru menurun dari 65,92% pada tahun 2018 menjadi 63,50% pada tahun 2019, atau turun sebesar 2,42 poin persentase. Penurunan berlanjut pada tahun 2020, di mana UMK kembali meningkat menjadi Rp2.743.471 namun TPAK perempuan turun lebih dalam menjadi 61,22%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan pasar tenaga kerja sehingga peningkatan standar upah minimum belum mampu mendorong peningkatan partisipasi kerja perempuan secara langsung (BPS, 2021).

Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2022, di mana UMK kembali mengalami peningkatan dari Rp2.746.305 pada tahun 2021 menjadi Rp2.748.924 pada tahun 2022, namun TPAK perempuan justru menurun dari 62,83% pada tahun 2021 menjadi 62,39% pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,44 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan UMK belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan partisipasi ekonomi perempuan secara langsung, yang dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja formal, pemulihan ekonomi yang belum merata antarwilayah, serta faktor sosial dan domestik yang memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja (BPS, 2023).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan perlunya kajian lanjutan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada wilayah

Pulau Jawa, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, maupun Indonesia secara agregat pada level provinsi (Nabila & Nugraha, 2025; Hasian & Harmadi, 2024; Pramudya & Abidin, 2025). Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis determinan TPAK perempuan di Provinsi Sumatera Utara pada tingkat kabupaten/kota masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai partisipasi kerja perempuan di Sumatera Utara masih menyisakan ruang penelitian yang cukup besar, terutama pada level daerah yang lebih rinci.

Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif kompleks dan heterogen dibandingkan banyak daerah lainnya. Di satu sisi, terdapat wilayah perkotaan seperti Kota Medan yang berkembang pesat pada sektor industri, perdagangan, dan jasa, sehingga menyediakan peluang kerja formal yang lebih luas. Di sisi lain, terdapat wilayah perdesaan seperti Labuhan Batu, Asahan, maupun beberapa daerah kepulauan yang masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha informal. Perbedaan struktur ekonomi tersebut sangat mungkin memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja, baik dari sisi kesempatan kerja, tingkat pendapatan, maupun jenis pekerjaan yang tersedia.

Selain aspek ekonomi, Sumatera Utara juga dikenal memiliki keragaman etnis dan budaya yang cukup tinggi, seperti Batak, Melayu, Nias, Jawa, Minang, dan etnis lainnya. Keberagaman ini berpotensi membentuk norma sosial, nilai budaya, serta pandangan yang berbeda mengenai peran perempuan dalam rumah tangga maupun aktivitas ekonomi. Pada sebagian wilayah, perempuan mungkin memiliki ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, sementara pada wilayah lain norma tradisional dapat menjadi faktor pembatas. Oleh karena itu, faktor sosial

budaya menjadi elemen penting yang membuat Sumatera Utara menarik untuk diteliti secara lebih mendalam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018–2024 menunjukkan bahwa TPAK perempuan di Kabupaten Nias Barat mencapai 90,75 persen, sedangkan di Kota Binjai hanya sebesar 40,11 persen. Selisih lebih dari 50 poin persentase dalam satu provinsi yang sama menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penentu partisipasi kerja perempuan di Sumatera Utara tidak bersifat seragam. Dengan demikian, analisis pada level provinsi dinilai belum mampu menggambarkan kondisi riil setiap daerah secara menyeluruh, karena pendekatan agregat cenderung menutupi variasi lokal yang justru penting untuk dipahami.

Selain dari sisi wilayah, penelitian terdahulu juga umumnya masih menelaah determinan TPAK perempuan secara parsial. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada pendidikan perempuan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, maupun tingkat kemiskinan (Septiawan & Wijaya, 2021; Iffah, 2024). Namun demikian, penelitian yang menguji secara simultan pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap TPAK perempuan masih sangat terbatas, terutama pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Padahal, ketiga variabel tersebut merepresentasikan dimensi yang berbeda, yaitu kesetaraan gender, kualitas sumber daya manusia, dan insentif ekonomi tenaga kerja, sehingga penting dianalisis secara terpadu dalam satu model empiris.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari sisi metodologi. Sejumlah studi sebelumnya masih menggunakan pendekatan regresi linier berganda atau data *cross-section*, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi antarwilayah dan perubahan antarwaktu secara simultan. Padahal, partisipasi kerja perempuan merupakan fenomena yang dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi daerah, kebijakan ketenagakerjaan, perkembangan pendidikan, serta kemajuan kesetaraan gender dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, penggunaan pendekatan data panel menjadi lebih relevan karena mampu menggabungkan dimensi waktu dan wilayah secara bersamaan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam satu model empiris untuk menganalisis pengaruhnya terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menelaah variabel-variabel tersebut secara terpisah, penelitian ini menguji ketiganya secara simultan sehingga dapat diketahui arah hubungan, tingkat signifikansi, serta besaran pengaruh relatif masing-masing variabel terhadap TPAK perempuan di Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi serta menjelaskan secara lebih komprehensif faktor-faktor yang berperan dalam menentukan tingkat partisipasi wanita dalam pasar kerja.

Selain penggunaan variabel yang diteliti, penelitian ini juga memiliki keunikan dari aspek data, yakni pemanfaatan data panel 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018–2024. Pendekatan ini

memungkinkan analisis yang lebih mendalam karena mampu menangkap heterogenitas karakteristik antarwilayah sekaligus dinamika perubahan yang berlangsung dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai faktor-faktor penentu TPAK wanita di Provinsi Sumatera Utara.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi ketenagakerjaan wanita serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan gender, perluasan kesempatan kerja formal, dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif. Dengan demikian, peningkatan TPAK wanita di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **“Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan gender terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara?

3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan gender, rata-rata lama sekolah perempuan dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan gender terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara.
4. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan gender, rata-rata lama sekolah perempuan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperluas kajian di bidang ilmu ekonomi dan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi wanita dalam angkatan kerja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan partisipasi wanita dalam angkatan kerja.